



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIYO WINDUTOMO
2. Jabatan : SEKRETARIS PRESIDEN
3. NHK : 892404

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.878.320.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/78 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/290 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.168.320.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.230.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ G-280 CDI RHD 2.8L AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. MOBIL, LAND ROVER DEFENDER Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.827.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **80.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.100.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **200.000.000**

Sub Total **Rp.** **10.315.820.000**

III. HUTANG **Rp.** **1.020.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **9.295.820.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.